

Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa

The Political Structure of Partai Kebangkitan Bangsa

Hanif Dhakhiri dan TB Massa Djafar

Universitas Nasional, Jakarta

hanifdhakhiri@gmail.com

tbmassadjafard@yahoo.com

Abstrak

Sebagai partai yang unik secara ideologi, tentulah amat menarik untuk mengkaji Partai Kebangkitan Bangsa dari struktur politiknya. Oleh karena itu, dengan menggunakan sudut pandang Maurice Duverger tentang struktur politik dan metode kualitatif, maka, penulis menganalisis seperti apa struktur politik Partai Kebangkitan Bangsa yang berbasis masyarakat Nadhatul Ulama tersebut, sehingga secara ideologi PKB dapat mendialogkan antara keislaman yang moderat dengan keindonesiaan yang diwarnai dengan pluralitas masyarakatnya. Kombinasi itu kemudian tercermin dalam asas atau dasar partai yang lebih memilih Pancasila sebagai pondasinya, bukan Islam.

Kata Kunci: Partai Kebangkitan Bangsa, Struktur Politik, Maurice Duverger

Abstract

As a unique party from ideology, it becomes so interesting to examine PKB from its political structure. Hence, by using Maurice Duverger's point of view about political structure and qualitative methods, therefore the writer analyses the political structure of PKB based on their Nadhatul Ulama's people, so that by ideology, PKB can negotiate between moderate Islam and Indonesia with its pluralist people. Those combinations soon are reflected in the principle and Party foundation which prefer Pancasila to Islam.

Keywords: PKB, Political Structure, Maurice Duverger

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU POLITIK
Universitas Nasional

Pendahuluan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tergolong merupakan partai dengan ideologi yang unik. Meski secara kelembagaan partai ini secara jelas mencantumkan Pancasila sebagai asas partai, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran PKB dibidani oleh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Kompromi antara identitas sebagai partai politik yang nasionalis dengan latar belakang historis menjadi kata kunci dalam memahami PKB.

Dalam pasal 3 Anggaran Dasar PKB ditegaskan; bahwa partai ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sementara, pada pasal 4 PKB menegaskan bahwa yang menjadi prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*.

Mencermati asas dan prinsip tersebut, terasa seperti ada kontradiksi. Jika asasnya dikokohkan oleh jangkar kebangsaan, sementara prinsip perjuangan PKB disandarkan pada prinsip keislaman, lalu sifat partai ini sendiri ditegaskan dalam pasal 5, bahwa PKB bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Sebagai partai yang dibidani oleh NU, maka struktur kepengurusan juga nyaris sama dengan organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 1926 tersebut. Dalam pasal 16 dijelaskan mengenai hal ini. Susunan kepengurusan PKB di masing-masing tingkatan organisasi partai terdiri dari (1) Mustasyar, (2) Dewan Syura, dan (3) Dewan Tanfidz.

Mustasyar, seperti dijelaskan pada pasal 17 adalah penasihat partai --- baik diminta maupun tidak, memberikan nasihat-nasihat organisasi kepada Dewan Syura dan Tanfidz. Sementara, Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai, sedang Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai.

Pada 1999, PKB menjadi bagian dari peserta pemilihan umum yang pertama di era reformasi. Perolehan suaranya cukup signifikan, yakni 13.336.982 atau sekitar 12,61 % dari keseluruhan suara. Dengan perolehan tersebut, PKB berhasil menempatkan 51 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sebenarnya, perolehan suara tersebut bukan merupakan sesuatu yang luar biasa, mengingat PKB mengandalkan suara *jam'iyah* NU yang cukup besar. Hanya saja, sebaran suara PKB memang masih sangat dominan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dalam perjalanannya, PKB terus mengalami transformasi. Secara rinci, perjuangan PKB dijelaskan dalam buku bertajuk "Khidmat Kami Bagimu Negeri." Selain pokok-pokok perjuangan serta misi yang ingin diperjuangkannya, buku ini juga menegaskan posisi PKB sebagai partai advokasi. PKB mencoba mengkhususkan perjuangannya terhadap kepentingan masyarakat marginal, seperti masyarakat di pedesaan, petani, guru, nelayan, institusi pesantren dan lainnya (Ahsanul Minan dkk, 2007).

Dari sisi etika politik, Imam Nahrowi (2006) menegaskan bahwa dalam pandangan PKB, sikap pragmatis yang semata-mata hanya memperebutkan kekuasaan jelas sangat merugikan perjuangan. Sikap tersebut hanya berisi intrik-intrik politik yang dilakukan orang tanpa ada kejelasan untuk apa ia ada. Pada titik inilah, menurut Nahrawi, PKB hadir sebagai partai politik yang lebih mengedepankan moralitas. PKB harus memanfaatkan momen di masa depan dalam suasana saat pragmatisme politik begitu menguat. Sementara di sisi lain, moralitas partai-partai politik pun semakin tergerus.

Formulasi ideal PKB di masa depan adalah meninggalkan model pengorganisasian partai yang bergaya "manajemen gardu ronda". Model seperti ini mengokohkan eksistensi nalar *keroyokan*, dengan kata lain, PKB masih terjebak dalam cara berpikir politik yang berbasis isu, momentum, bersifat jangka pendek, spontan dan tentu saja tidak terlembaga dalam organisasi partai. Dari aspek manajemen partai, tentu saja model ini tidak cukup efektif sebagai mesin partai. Kemudian muncul istilah politik korporasi yang berbasis nalar organisasional sebagai format ideal

dari PKB (Muhammad Hanif Dhakiri dkk, 2006).

Dalam politik, aspek yang penting untuk diperhatikan adalah strukturnya. Meminjam Maurice Duverger (1993), salah seorang sosiolog politik mengenalkan pembagian sederhana tentang struktur politik yang merupakan bagian dari sosiologi politik. Lebih lanjut, Duverger (1993) mengatakan, sosiologi politik merupakan studi mengenai kekuasaan di dalam tiap pengelompokan manusia, bukan hanya negara-bangsa. Kelompok ini kemudian menjadi struktur, kerangka acuan ketika konflik dan integrasi terjadi di sana. Dalam kerangka demikian, maka secara singkat, struktur politik merupakan pengelompokan sosial secara berbeda-beda. Secara sederhana, Duverger membagi struktur politik berdasarkan struktur fisik dan struktur sosial.

Dengan mendasarkan diri pada penjabaran Duverger penulis hendak melihat fenomena PKB dari aspek struktur politik ini. Dengan mengamati struktur politik yang membingkainya, maka bisa diketahui kekuatan sekaligus kelemahan dari par-tai ini. Konflik dan integrasi, seperti yang kerap muncul dalam tiap kelompok sosial tentu tidak lahir dari situasi hampa. Dengan menelaah struktur yang ada di dalamnya, maka kita akan lebih mudah memahami latar belakang dari hadirnya konflik atau faktor-faktor yang menjadi perekat dari kelompok tersebut.

Struktur dan Sosiologi Politik

Struktur politik bisa kita maknai sebagai komponen-komponen politik yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Secara fungsional, struktur politik merupakan institusionalisasi relasi antara komponen-komponen yang pada akhirnya membentuk sistem politik.

Dalam hal ini, Maurice Duverger (1993) mencoba menjelaskan tentang dua model studi yang dikembangkan dalam mencermati struktur politik. *Pertama*, pendekatan vertikal, yakni tiap komunitas didefinisikan sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang berbeda. *Kedua*, pendekatan horisontal, yakni tiap unsur yang muncul di dalam berbagai jenis komunitas.

Lebih lanjut, Duverger (1993) melihat bahwa pendekatan kedua yang paling mungkin digunakan dalam sosiologi politik. Hal itu dimaksudkan karena pendekatan ini lebih me-

mungkinkan untuk memberi batasan yang agak lebih jelas tentang hubungan antara fenomena politik yang terjadi dengan berbagai unsur komunitas manusia.

Melalui pendekatan “horisontal” inilah, ia kemudian membagi struktur politik ke dalam dua dua skema besar, struktur fisik dan struktur sosial. Struktur fisik digunakan untuk menunjukkan unsur yang paling dekat dengan alam, antara lain geografi dan demografi. Di sini, geografi bisa berkaitan dengan luas-sempit atau besar-kecilnya sebuah wilayah. Sementara demografi di antaranya banyak atau sedikitnya jumlah penduduk serta mayoritas-minoritasnya jumlah pemilih.

Selanjutnya, kekuasaan politik sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai batasan-batasan wilayah. Konflik kerap terjadi dalam upaya memperebutkan wilayah. Sebaliknya, wilayah juga merupakan area pemersatu. Salah satunya, identitas warga negara dibentuk oleh satu ruang yang sama dengan batasan-batasan tertentu.

Sekali lagi, konflik tentang batas wilayah, jalur transportasi, atau sumber daya alam serta komunikasi menunjukkan betapa pentingnya aspek demografi dalam struktur politik. Sementara, persoalan revolusi atau perang, dilihat dari sisi tekanan penduduk menunjukkan pentingnya struktur demografik.

Selain struktur fisik, Duverger juga menyinggung apa yang disebut sebagai struktur sosial dalam politik. Ia menyebut, setidaknya ada empat unsur dari struktur sosial, yakni teknologi, lembaga-lembaga, kebudayaan dan keyakinan.

Secara sederhana, struktur sosial dari politik sebagai lawan dari struktur fisik berasal dari buatan manusia, bukan alam. Di dalamnya termasuk penemuan material (alat dan mesin), sistem hubungan kolektif (perusahaan, sistem matrimonial), bahkan doktrin dan kebudayaan (Duverger, 1993). Seperti yang dijelaskan di awal, sesungguhnya perbedaan antara struktur fisik dan sosial tidak tampak dengan jelas. Mengingat, struktur fisik bergabung dengan banyak faktor sosial dan keyakinan kolektif yang tumbuh di sekelilingnya, sama pentingnya dengan kenyataan material. Sebaliknya, faktor fisik berkelindan dalam struktur yang kita namakan sosial; kebutuhan alami manusia membentuk dasar lembaga-lembaga ekonomi; kondisi-kondisi fisik

perkembangan anak memainkan peran penting dalam hubungan sosial dan dalam pembentukan ideologi, mitos serta peradaban.

Setidaknya, ada tiga bagian dari struktur sosial yang punya pengaruh terhadap politik; teknologi, lembaga-lembaga dan kebudayaan (termasuk di dalamnya ideologi atau keyakinan). Keterampilan teknologi adalah cara yang digunakan manusia untuk mengolah benda-benda, alat-alat, mesin dan sebagainya. Sementara, lembaga-lembaga adalah alat untuk mempertahankan ketertiban hubungan sosial yang mapan --- status hukum keluarga, undang-undang yang mengatur barang-barang dan milik, dan konstitusi politik. Selanjutnya, kultur adalah ideologi, keyakinan dan ide-ide kolektif yang pada umumnya dianut dalam komunitas tertentu (Duverger, 1993).

Selain Duverger, tokoh lain yang mencoba menjabarkan tentang struktur politik adalah Gabriel Almond dan Powell Jr. Keduanya mengaitkan struktur ini sebagai bagian dari sistem politik. Menurutnya, setiap sistem politik pasti memiliki struktur serta fungsi di dalamnya. Meski sebuah sistem terspesialisasi, tetapi semua struktur politik mempunyai sifat multi-fungsional.

Menurut Almond dan Powell Jr (1978), struktur politik dapat dibedakan dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (*maintain or change*) struktur politik, dan secara khusus, struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hampir selalu ada dalam setiap sistem politik.

Struktur proses politik melibatkan bagaimana fungsi artikulasi kepentingan, agregasi, pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dilaksanakan oleh struktur politik. Struktur proses melibatkan berbagai kelompok kepentingan, antara lain partai politik, media massa, eksekutif, dan lain sebagainya.

Sementara Almond dan Coleman (dalam Kartaprawira, 2007) menegaskan, dalam kehidupan demokratis, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua, yakni (1) formal, mesin politik yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh

masyarakat; dan (2) informal, struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Di sini, partai politik, bisa dimasukkan dalam kelompok kepentingan, *opinion leaders* dan sebagainya.

PKB dan Konstelasi Politik Indonesia

Sejarah pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia pasca kemerdekaan dimulai pada 1955, yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pemilu yang demokratis selain PEMILU 1999. Pada PEMILU 1955, Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih 22,3 persen suara, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 20,9 persen, Nahdlatul Ulama (NU) 18,4 persen dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 16,4 persen (Feith, 1962).

Setelah era Orde Lama yang dipimpin oleh Sukarno jatuh, PEMILU baru bisa terlaksana kembali pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Tepatnya, pada 1971 PEMILU kali ini diikuti oleh 10 partai politik, termasuk Golongan Karya (Golkar), kontestan baru yang kemudian menjadi kekuatan politik utama di masa itu.

Dua tahun setelah PEMILU, muncul keputusan untuk melakukan penyederhaan dengan pengelompokan ke dalam tiga golongan. Empat Partai Islam, masing-masing NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada 1984, NU memutuskan keluar dari PPP dan kembali kepada khitahnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan (Porter, 2002). Sementara, lima partai --- PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) --- dan yang terakhir adalah Golongan Karya atau Golkar, kesemua partai harus berasaskan Pancasila.

Pada masa Orde Baru, dinamika partai politik menjadi sangat rendah. Utamanya, dalam konteks partisipasi politik bangsa Indonesia. Pada masa perjuangan menjelang kemerdekaan, partai politik hadir sebagai bagian dari bangkitnya gairah untuk kemerdekaan. Sementara Soekarno

maupun Soeharto, menurut Miriam Budiardjo (2010), menganggap kalau partai politik itu sebagai sumber kekacauan sistem politik yang mereka bangun.

Sejak 1998, Indonesia memasuki fase baru dalam politik. Lengsernya Suharto menandai berakhirnya era otoritarianisme dan dimulainya era demokrasi. Dalam pemilihan umum (PEMILU), salah satunya ditandai dengan hadirnya kontestan yang lebih banyak dibanding pada masa Orde Baru. Di PEMILU pertama setelah reformasi, 1999, tercatat 48 partai politik ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut.

NU pada masa Orde Baru tidak melakukan aktivitas politik kekuasaan, tidak bisa melepaskan diri dari euforia reformasi. NU yang tidak sanggup membendung desakan warganya yang sangat berhasrat untuk memiliki saluran politik, juga merasa perlu untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk berpartisipasi dengan mendirikan partai politik (Choirie, 2008).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan produk reformasi. Kelahiran PKB yang dibidani oleh NU seperti reinkarnasi. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 atau bertepatan dengan 29 Rabiul Awwal 1419 H. Ada lima orang yang menjadi deklarator, di antaranya KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, KH. A. Muchith Muzadi.

Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PKB ditegaskan pembentukan PKB memiliki tiga tujuan utama, yakni (1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; (2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; (3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Di era reformasi, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menjadi salah satu deklarator PKB dan juga lokomotif penguatan masyarakat sipil di era Orde Baru terjun di dunia praktis. Sejatinnya, menurut Gus Dur, reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada 1998 belum sepenuhnya dianggap sebagai ruang yang demokratis. Kepada Greg Barton penulis biografinya, Gus Dur (dalam Barton, 2010) mengomentari ihwal reformasi itu. "Saya tercabik antara harapan dan keputus-asaan".

Menurut Gus Dur (dalam Barton, 2010), perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan dalam memanfaatkan momentum itu masih 50:50.

Karir Gus Dur di dunia politik sampai pada titik puncaknya ketika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke 4 pada 20 Oktober 1999. Padahal, sebagai partai pemenang PEMILU (33%), Megawati Sukarnoputri --- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan --- diperkirakan akan keluar sebagai pemenang. Namun akhirnya, Gus Dur yang terpilih.

Naiknya Gus Dur di panggung kekuasaan membukakan pintu bagi "santri-santrinya" untuk turut berkecimpung dalam dunia politik. Preseden ini yang dirasa sangat legitimaris bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) karena Gus Dur sendiri yang membukakan jalan untuk bertarung di ranah politik (kekuasaan).

Dengan mengandalkan suara kelompok Islam tradisional, PKB menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan. Di pesta demokrasi perdana pada 1999, PKB meraih 12,61 persen atau meraup 13.336.982 suara. Dengan jumlah itu, partai yang dideklarasikan oleh para kiai NU ini berhak menduduki 51 kursi di DPR RI.

Pada PEMILU 2004, PKB menduduki peringkat ketiga dengan raihan 12.002.885 suara (10,61 persen) dan mendapatkan 52 kursi DPR RI. Periode lima tahunan berikutnya, raihan suara PKB di PEMILU 2009 turun menjadi 5.146.302 suara (4,95 persen) dan hanya mendapatkan 28 kursi DPR --- selanjutnya pada PEMILU terakhir, 2014, PKB mendapatkan 11.298.957 atau 9,04 persen suara. Dengan perolehan tersebut, "partai hijau" ini berhak menduduki 47 orang wakilnya di Senayan.

Raihan PKB pada 2014 menjadi sangat signifikan dan bahkan meningkat 100 persen dibanding 2009. Hal itu wajar, PKB selalu terlibat dalam konflik internal yang hampir bisa dipastikan membuat keropos sendi-sendi kekuatan politiknya. Setidaknya, ada tiga kali konflik internal PKB yang cukup mengganggu roda partai ini. *Pertama*, konflik dengan Matori Abdul Djilil (pada 2001). *Kedua*, konflik dengan kelompok Alwi Shihab-Choirul Anam (pada 2004). *Ketiga*, konflik Gus Dur-Muhaimin Iskandar (pada 2008) (Chusnunia, 2011).

Ketiga konflik itu, selalu menghadirkan posisi Gus Dur, tetapi bukan sebagai penengah atau semacam *primus enterpares*. Tampilnya Gus Dur dalam konflik-konflik internal PKB membuat konflik di tubuh partai tersebut selalu hampir tak bisa terdamaikan (*zero sum-game*). Konflik tidak menghadirkan penyelesaian dalam arti yang sesungguhnya (*win-win solution*), yang kemudian muncul adalah pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dalam dua kasus pertama, pada akhirnya yang kalah membentuk partai sempalan (Chusnunia, 2011). Inilah situasi yang membuat kenapa perolehan suara PKB merosot pada 2009.

Rupanya, konflik internal yang terus mendera PKB membuat partai ini harus senantiasa berbenah diri. Pengalaman untuk keluar dari situasi sulit, serta upaya untuk tetap bertahan yang disertai dengan penurunan perolehan suara, membuktikan massa PKB masih tetap loyal. Pengalaman selalu berada dalam situasi konflik, juga dimanfaatkan untuk melakukan perluasan rekrutmen politik sebagai dimensi internal sekaligus eksternal. Secara internal, inilah saat terbaik untuk membangun institusi yang sehat. Kondisi inilah yang dijadikan cermin oleh PKB yang pada gilirannya membuat partai ini kembali memperoleh suara teramat signifikan di PEMILU 2014.

Ideologi Partai dan Lembaga Pesantren

Dari sisi pemahaman keagamaan, ideologi politik PKB tidak bisa dilepaskan dari *platform* politik NU. Sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar, maka NU mengembangkan visi dan misi politik sebagaimana kelompok tradisionalis Islam lainnya, yakni mengambil rujukan teoritis dari pemikiran al-Mawardi, al-Ghazali dan lainnya yang biasa ditemukan dalam teks NU (Fealy, 2009).

Greg Fealy (2009) menyebutkan, sebenarnya dasar formal pendekatan politik NU adalah yuris-prudensi abad pertengahan. Di sini, *fiqh* memainkan peran penting dalam tradisi keislaman NU. Dalam tradisi keilmuan Islam, *fiqh* selalu berkaitan dengan pengetahuan lainnya, seperti *ushul fiqh* dan *kaidah fiqh* (Haidar, 1994). Selanjutnya, kaidah *fiqh* menjadi dasar bagi warga NU dalam membahas perilaku politik NU (Fealy, 2009).

Selain ideologi politik, tidak kalah penting untuk mencermati peran dari institusi pesantren

dalam dinamika serta gerak politik PKB. Sebagai saluran politik warga *Nahdliyin*, maka PKB juga menjadi saluran politik bagi warga pesantren.

Sebagaimana kita ketahui, pondok pesantren mempunyai kultur yang unik, sehingga digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia (Wahid, 1999). Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang telah menunjukkan kemampuannya dalam mencetak kader-kader ulama di Indonesia. Dengan adanya tujuan dari pondok pesantren, maka hal tersebut semakin memperkuat eksistensinya dari waktu ke waktu (Tim Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003).

Meski secara normatif banyak yang melekatkan pesantren dengan fungsi edukasi, tetapi dalam batas-batas tertentu, institusi ini juga memainkan peran dan fungsi politiknya. Misalnya pada masa kolonial, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dekat dengan rakyat. Pada masa itu, boleh dikata, lembaga ini lepas dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial Belanda. Karena, pemerintah kolonial menilai sistem pendidikan Islam itu sangat buruk, baik dari segi tujuan, metode maupun bahasa (Arab) yang dijadikan sebagai pengantarnya (Mastuhu, 1994). Selain itu, pemerintah Belanda juga mulai khawatir dengan perkembangan umat Islam di Indonesia.

Sejak dahulu, pesantren selalu mengambil jarak dengan pemerintah. Keadaan itu telah membuat mereka secara terus menerus harus mengembangkan dirinya menjadi sokoguru bagi perkembangan dakwah Islam. Kekhawatiran pemerintah kolonial semakin bertambah, karena, pesantren juga mengajarkan tentang cinta tanah air. Ini misalnya didasarkan pada pepatah, “*hubbul wathan minal iman*” yang artinya cinta tanah air sebagai bagian dari iman, serta menumbuhkan sikap patriotik. Selain sebagai tempat menuntut ilmu keagamaan, pesantren juga menjadi ruang konsolidasi politik. Tempat untuk menyusun strategi perang melawan kolonial.

Situasi itu jelas terlihat, ketika Indonesia memasuki zaman revolusi fisik. Santri banyak yang membentuk barisan tentara. Salah satunya adalah Hizbullah yang kemudian menjadi embrio Tentara Nasional Indonesia (Boland, 1971). Ketika Belanda dikalahkan Jepang, kalangan pesantren

dan NU terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh NU, KH. Hasyim Asy'ari, ditahan. Saat Jepang ditaklukan sekutu, kondisi bangsa Indonesia belum juga stabil. Akhirnya, 22 Oktober 1945 para ulama dipimpin KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan seruan jihad melawan sekutu --- yang dikenal dengan Resolusi Jihad, dan dikeluarkan sebanyak dua kali. Masing-masing pada 22 Oktober 1945 dan 29 Maret 1946.

Hubungan antar pondok pesantren terbangun dan semakin menguat ketika NU didirikan pada 1926. Jaringan di antara para ulama Hindia Belanda semakin terlembagakan. Ulama menjadi golongan sosial yang distinktif (Burhanuddin, 2012). NU menjadi wadah modern bagi kelompok muslim tradisional. NU memfasilitasi ulama untuk membicarakan kembali tentang Islam tradisional dan menciptakan otoritas keagamaan di dalam komunitas muslim. Pengetahuan masyarakat muslim yang berbasis di pesantren, tidak lagi hanya diperbincangkan secara terbatas di kalangan mereka saja. Sekarang, intelektual pesantren turut tampil di panggung sosial dan politik.

Hal tersebut dimulai saat Jepang merubah kebijakan dengan memberikan porsi kepada kelompok Islam. Selain dengan membentuk Hizbullah pada 1942, pemerintah Jepang juga membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi menjadi semacam federasi umat Islam Indonesia. Lembaga ini menggantikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Di Majelis Syuro Muslimin Indonesia, para Kyai mendapatkan tempat. KH. Hasyim Asy'ari menjadi pemimpin, dibantu Mas Mansoer dari Muhammadiyah, Wahid Hasyim, Zainal Arifin (keduanya dari NU) serta Anwar Tjokroaminoto dari Partai Sarikat Islam Indonesia (Benda, 1958).

Analisis Struktur Fisik dan Sosial PKB

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang jika mengikuti Montesquieu, merupakan bangsa yang cenderung untuk mengembangkan kebebasannya ketimbang menjadi bangsa benua. Luas negara Indonesia adalah 1,904,569 KM², dengan 4,85% di antaranya adalah perairan.

Sebagai negara kepulauan, ekspedisi para pelaut nusantara tidak perlu diragukan lagi. Robert Dick-Read menunjukkan dengan baik bagaimana sisa-sisa peninggalan pelaut Indonesia di Afrika,

jauh lebih banyak daripada yang diikuti secara umum (Robert Dick-Read, 2008).

Meminjam Bernard Vlekke; (2008), kepulauan Indonesia terletak di jalur laut utama antara Asia bagian timur dan selatan. Dalam wilayah antara seperti ini, dengan sendirinya, akan terdapat populasi yang terdiri atas beragam ras. Tidak diragukan lagi, lanjut Vlekke, bahwa Jawa harus dianggap sebagai tempat tinggal salah satu ras manusia yang paling awal.

Perjalanan yang dilakukan melalui "jalan besar alami" juga terjadi pada masa penyebaran agama. Misalnya kehadiran Islam di Indonesia, juga tidak lepas dari pengaruh geografis. Kehadiran Islam sering disebut sebagai awal dari sejarah modern bangsa Indonesia. Beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut, antara lain, unsur kebudayaan dan agama. Dalam pandangan MC. Ricklefs (2008), sejarah Islamisasi di Indonesia pada rentang 1200-an, menjadi unsur penting dalam proses ini. *Pertama*, proses (islamisasi) ini yang kemudian membuat pelbagai perubahan. *Kedua*, sejarah modern Indonesia ditandai dengan adanya interaksi antara Indonesia dan Barat pada 1500. *Ketiga*, historiografi, tulisan pada masa ini tidak lagi menggunakan bahasa Jawa atau Melayu Kuno, akan tetapi, sudah menggunakan bahasa "Indonesia Modern" seperti Jawa, dan Melayu dalam aksara latin.

Interaksi bangsa nusantara dengan bangsa-bangsa lain tentu saja karena memanfaatkan struktur fisik. Efek politiknya pun cukup terasa. Salah satu yang membekas adalah invasi pemerintah kolonial. Memang ada banyak perspektif untuk melihat kehadiran kolonialisme di Indonesia. Di satu sisi, situasi ini memang sangat membatasi ruang gerak bangsa Indonesia --- kekayaan alamnya banyak dieksploitasi. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran mereka justru menjadi sti-mulus berkobarnya gelombang nasionalisme.

Ada beberapa sebab yang diidentifikasi sebagai awal mula pola kebangkitan gerakan kebangsaan. Empat faktor yang sangat berpengaruh terhadap geliat gerakan kebangsaan ini, antara lain (Kartodirdjo, 1972). *Pertama*, faktor ekonomi. Di negara-negara jajahan, nasionalisme merupakan reaksi terhadap kolonialisme. Pada akhirnya, kehadiran Sarekat Islam, Boedi Utomo, Pasundan, dan Perkumpulan Bupati menjadi pertanda bagi

kebangkitan gerakan anti-kolonial. Gerakan ekonomi ini kemudian mencapai puncaknya pada revolusi komunis di 1926. *Kedua*, faktor sosial. Faktor ini lebih disebabkan adanya diferensiasi sosial. Perhimpunan yang bersifat nasionalis didirikan dengan salah satu tujuannya menentang kolonialisme. *Ketiga*, aspek kebudayaan. Pada awalnya nasionalisme Indonesia merupakan fanatisme kesukuan yang sempit. Kemudian, gerakan kebudayaan memperkuat kesadaran nasional dan merupakan tambahan bagi gerakan ekonomi yang mencita-citakan kehidupan ekonomi yang bebas bagi rakyat. Serta kebudayaan baru: sebagai basis kehidupan baru, dengan mengambil alih unsur-unsur barat. *Keempat*, aspek politik. Fase baru kesadaran nasional, meski masih belum jelas formulasinya, tetapi sudah merupakan sebuah aspirasi politik. Kehadiran organisasi-organisasi sosial, menghendaki pemerintah untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyatnya.

Struktur fisik lain yang tak kalah penting untuk dicatat adalah penduduk. Hingga 2010, penduduk Indonesia tercatat berjumlah 237.641.326 (www.bps.go.id. Diakses pada 12 Juli 2014). Konsentrasi dan lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Jawa Barat, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, 43.053.732.

Jika dianalisis, gambaran Montesquieu tentang karakter bangsa kepulauan dan yang hidup di iklim sedang memang tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk menggambarkan karakter politik masyarakat Indonesia. Namun, beberapa pernyataan Montesquieu bisa menjadi rujukan. Masyarakat yang nusantara, terutama di Jawa, menjadi sangat akomodatif terhadap budaya bangsa lain karena struktur geografis telah menjadikan mereka sangat mudah berinteraksi.

Memang agak sulit untuk mengaitkan struktur geografis ini terhadap aktivitas PKB dan juga partai politik lain pada umumnya. *Pertama*, kondisi geografis nyaris tak pernah menjadi persoalan yang fundamental, karena sebagian besar sudah bisa diatasi oleh teknologi. *Kedua*, senada dengan Duverger, salah satu faktor geografis, yakni iklim, tidak bisa dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap *psyche* manusia.

Boleh dikata, yang memiliki pengaruh langsung adalah ketika kita berbicara tentang

eksistensi PKB dalam konteks ruang. PKB lebih banyak mengandalkan konstituen masyarakat pedesaan dan kalangan muslim tradisional. Dengan kata lain, meski telah menyatakan sebagai partai terbuka, tetapi sebagian besar raihan PKB tetap mengandalkan suara Nahdliyyin yang mayoritas berada di pedesaan.

Masalah lain yang dihadapi dari aspek fisik adalah persebaran penduduk (baca: pemilih) yang tidak merata. Karena PKB identik dengan NU, dan NU diakui atau tidak terkonsentrasi di Jawa, maka perolehan suaranya juga mengandalkan basis yang ada di dua provinsinya, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada PEMILU 2014, misalnya, perolehan kursi PKB lebih sedikit dari Partai Amanat Nasional (PAN) meski dari sisi jumlah suara PKB lebih unggul. PKB meraih 11.298.957 suara dan PAN 9.481.621 suara. Akan tetapi, PAN bisa mengantarkan 49 orang kadernya sebagai anggota dewan, sementara, PKB hanya 47 orang saja. Hal ini diakibatkan konstituen PKB terkonsentrasi di Jawa, sedangkan PAN cenderung menyebar.

Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut, persoalan di atas tidak bisa semata-mata dianggap sebagai faktor tunggal masalah pemilih yang tidak merata. Hal itu juga diakibatkan oleh aturan, yakni SK KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil PEMILU anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Di sini, batas antara aspek fisik dan sosial menjadi agak kabur. Padahal, keduanya merupakan faktor yang saling mempengaruhi.

Agaknya, struktur fisik menjadi salah satu perspektif yang sedikit sekali terasa relevansinya dalam konteks struktur politik Indonesia kontemporer, khususnya PKB. Memang ada konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti di Papua. Akan tetapi, PKB sebagai salah satu institusi politik, tidak ada dalam tarik menarik kepentingan atas kekayaan alam tersebut.

Gagasan Duverger tentang struktur fisik itu bisa dipahami sebagai satu penanda bahwa politik itu berkaitan dengan ruang, lokasi dan "jalan alami." Namun, seperti yang juga telah disinggung Duverger, antara yang fisik dengan sosial memang tidak memiliki garis penegas yang tajam. Rekayasa manusia terhadap alam (bumi, tanah dan air), telah membuat geografi bukan

saja sesuatu yang fisik, tetapi juga sosial. Begitu juga dalam masalah demografis. Campur tangan manusia dengan menggunakan pembatasan kelahiran, menandakan batasan yang tak terlampaui jelas itu. Begitupun juga sebaliknya. Banyak unsur sosial yang didasarkan atas fisik. Misalnya, agama-agama animistik (sosial) yang mendasarkan teologinya pada kepercayaan terhadap alam.

Selanjutnya, aktivitas di PKB bisa dikatakan sebagai makropolitik, yakni aktivitas politik di komunitas yang besar. Jika dalam komunitas kecil perjuangan politik mengambil karakter yang hakikatnya bersifat personal dan organisasi politik formal --- hanya aliansi antara individu-individu dan kesamaan-kesamaan pribadi --- maka tidak demikian halnya dalam partai politik.

Di PKB, perjuangan politik adalah kolektif, juga individual. Dalam komunitas besar juga integrasi lebih meliputi masalah-masalah organisasi komunitas daripada hubungan antar personal, demikian pun masalah keyakinan dan sikap publik yang membuat masyarakat secara keseluruhan menjadi berarti bagi anggota-anggotanya. Akan tetapi, Duverger mengingatkan; masalah dalam politik makro adalah birokratisasi, dan itu yang terjadi pada tiga kali konflik internal yang ada dalam tubuh PKB.

Jika struktur fisik agak sulit untuk dilihat korelasinya, maka tidak demikian halnya dengan struktur sosial. Ideologi politik PKB menjelaskan tentang kekuatan keyakinan konstituennya terhadap partai yang juga bisa menjadi saluran politik warga NU. Barangkali yang perlu ditegaskan di sini adalah memahami Islam dalam konteks ideologi politik PKB.

Dalam Anggaran Dasar, kata "Islam" hanya muncul satu kali, yakni di pasal 4 yang menyinggung prinsip perjuangan partai. "Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah."

Dalam *Mabda' Siyasi* bahkan tidak ada satupun kata "Islam" muncul di sana. Apakah ini berarti PKB telah beralih menjadi partai sekuler?

Tentu saja tidak. PKB memahami Islam

dalam konteks nilai, ide dan semangat. Ini tentu bukan tanpa pembacaan yang cermat. Mengutip Choirie, Islam di Indonesia sangat dibatasi oleh pemerintah Belanda. Mereka memberi Islam ruang untuk ibadah, tetapi menekan Islam dalam berpolitik. Latar belakang ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak pernah menjadi kekuatan tunggal yang memayungi semua warga negara Indonesia. Dari sisi ini, maka tidak ada beban sejarah bagi PKB untuk menjadikan Islam sebagai hukum formal negara.

Ideologi NU yang dikembangkan pada masa itu dan kemudian ditransformasikan, tercermin pada *mabda siyasi* PKB. Tentu saja tidak hanya ide-ide segar di era 80-an yang dijadikan sebagai landasan etika oleh PKB, akan tetapi, juga prinsip-prinsip politik yang dianut oleh *founder* NU. Boleh dikata, 1984 adalah merupakan penegasan tentang pandangan NU terhadap negara. Dalam kerangka inilah, maka PKB melakukan transformasi nilai-nilai politik sebagaimana yang telah digariskan oleh NU.

Meminjam ilustrasi KH. Masdar Farid Mas'udi, PKB memang dilahirkan oleh NU meski perkawinannya tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, perkawinan yang merupakan buah pemikiran alim ulama itu tetap sah, karena perkawinan tersebut disertai akad, cita-cita dan tujuan yang mulia.

Selanjutnya, struktur sosial lain yang juga penting untuk dicermati dalam struktur politik PKB adalah lembaga pesantren. Pesantren termasuk kategori *institution by design* bukan *institution by fact*. Setidaknya ada tiga jenis lembaga normatif, yaitu hukum, prinsip moral, dan kebiasaan sosial (*social customs*). Ketiganya merupakan sistem nilai, ini-lah yang membedakannya dengan lembaga yang didirikan karena kebetulan.

Zamakhshari Dhofier (1982) menjelaskan, terdapat lima unsur yang ada dalam tiap pondok pesantren, yakni pondok, mesjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri dan kiai

Hiroko Hirokoshi membantah tesis Geertz tentang peran kiai. Horikoshi (1984) mengatakan, kiai justru bisa berperan dalam proses perubahan sosial dengan cara yang khas. Kiai tidak menyaring informasi, akan tetapi, menawarkan agenda perubahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dirdjosanjoto (2013) kemudian mencari jalan tengah antara simpulan Geertz dan Hori-koshi. Ia tidak menolak bahwa dalam satu waktu, kiai berperan sebagai *cultural broker* dan juga agen perubahan sosial. Menurutnya, perlu dibedakan antara kiai langgar, yang merupakan pemimpin komunitas lokal di sekitar langgar. Otoritasnya didasarkan pada penerimaan dari dan berhubungan dengan komunitas lokal yang mereka pimpin --- kiai pesantren; yang bisa dilihat dan dikatakan sebagai kiai supralokal yang memiliki santri dari dan pengikut dari berbagai tempat yang luas. Melalui jaringan transmisi ilmu, para kiai pesantren membangun hubungannya dengan kiai-kiai di pesantren lain. Hubungan ini bisa dikatakan juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan eksklusivitasnya --- dan kiai tarekat, yakni kiai yang memimpin tarekat sebagai kelompok yang bisa dikatakan eksklusif.

Dengan mencermati begitu luasnya jejaring yang dimiliki, maka kiai sangat berkontribusi jika mampu memainkan perannya dalam konteks politik. PKB melihat hal ini tidak hanya semata-mata dari sisi pragmatisme politik, tetapi juga latar sosio-historis termasuk ideologis. Kiai pesantren memiliki peran tidak hanya sebagai pimpinan pesantren, tetapi juga juru kampanye dan agen sosialisasi politik PKB.

Peran Kiai dalam politik di kalangan NU juga tidak hanya dalam konteks ia sebagai makelar budaya atau *cultural broker* seperti yang disinggung Geertz. Dalam politik, kiai juga berperan sebagai *political broker*. Ia menjadi agen dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik. Bahkan di PKB, tak sedikit kiai yang juga menjadi *political actor* (aktor politik) (Halim, 2014).

Kondisi ketika Geertz melakukan penelitian terhadap kiai tentu sangat berbeda dengan sekarang. Peran ini tentu saja tidak selalu baik. Keterlibatannya dalam politik memunculkan dua sisi, positif dan negatif. Menjadi positif karena mampu menambah dan memperluas akses pesantren dan warga NU terutama ke pemerintahan. Jika mampu berperan sebagai legislator atau eksekutor yang baik, maka citra pesantren tentu akan semakin terangkat. Sementara, sisi negatifnya, ketika sebuah partai mengalami konflik, internal maupun eksternal. Banyak pihak yang menyangkan keterlibatan kiai dalam dunia politik, keadaan itu

menjadikan kharisma kiai menurun, kepercayaan masyarakat juga berkurang. Karena pada akhirnya, tidak ada bedanya antara kiai dengan politisi-politisi yang acap kena stigma tersebut.

Simpulan

Ada dua point besar sebagai simpulan dari bahasan mengenai perspektif struktur politik terhadap PKB. *Pertama*, gambaran Montesquieu tentang karakter bangsa kepulauan dan yang hidup di iklim sedang, memang tidak bisa sepenuhnya dapat digunakan untuk menggambarkan karakter politik masyarakat Indonesia. Namun, beberapa pernyataan Montesquieu bisa menjadi rujukan. Masyarakat yang nusantara, terutama di Jawa, menjadi sangat akomodatif terhadap budaya bangsa lain karena struktur geografis telah menjadikan mereka sangat mudah untuk berinteraksi.

Terlihat agak sulit mengaitkan struktur geografis ini terhadap aktivitas PKB dan juga partai politik lain pada umumnya. *Pertama*, kondisi geografis nyaris tak pernah menjadi persoalan yang fundamental karena sebagian besar sudah berhasil diatasi oleh teknologi. *Kedua*, sebagaimana Duverger (1993), betapa salah satu faktor geografis, yakni iklim, tidak bisa dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap *psyche* manusia.

Yang memiliki pengaruh langsung adalah ketika kita berbicara soal eksistensi PKB dalam konteks ruang. PKB lebih banyak mengandalkan konstituen masyarakat pedesaan, dan kalangan muslim tradisional. Meski telah menyatakan sebagai partai terbuka, tetapi PKB tetap mengandalkan suara Nahdliyin yang mayoritas berada di pedesaan.

Masalah lain yang dihadapi dari aspek fisik adalah persebaran penduduk (baca: pemilih) yang tidak merata. Karena PKB identik dengan NU, dan NU diakui atau tidak terkonsentrasi di Jawa, maka perolehan suara PKB juga mengandalkan basis dari dua provinsinya, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut, persoalan di atas tidak bisa semata-mata dianggap sebagai faktor tunggal masalah pemilih yang tidak merata. Hal itu juga diakibatkan oleh SK KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Di

sini batas antara aspek fisik dan sosial menjadi agak kabur. Padahal, keduanya merupakan faktor yang saling mempengaruhi.

Aktivitas di PKB bisa dikatakan sebagai makropolitik, yakni aktivitas politik di komunitas yang besar. Jika dalam komunitas kecil perjuangan politik mengambil karakter yang hakikatnya bersifat personal dan organisasi politik formal --- hanya aliansi antara individu-individu dan kesamaan-kesamaan pribadi, maka tidak demikian halnya dalam partai politik.

Jika struktur fisik agak sulit untuk dilihat korelasinya, tidak demikian halnya dengan struktur sosial. Ideologi politik PKB menjelaskan tentang kekuatan keyakinan konstituennya terhadap partai yang juga menjadi saluran politik warga NU. Yang perlu ditegaskan di sini adalah memahami Islam dalam konteks ideologi politik PKB.

Kedua, dengan memperhatikan struktur politik PKB (terutama struktur sosial), maka sistem ideologi keagamaan yang terbuka (kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme) ditambah dengan kompleksitas status dan peran kiai di lembaga pesantren, telah menjadikan PKB memiliki struktur politik yang khas.

Setelah melakukan pembahasan tentang struktur politik, baik fisik maupun sosialnya, sekarang kita hendak mencermati apakah struktur politik itu dapat mendukung atau justru memunculkan hambatan bagi PKB dalam menjalankan fungsinya.

Dari sisi ideologi (baik sosial maupun agama), PKB seperti hendak mendialogkan antara keislaman yang moderat dengan keindonesiaan yang diwarnai dengan pluralitas masyarakatnya. Kombinasi itu kemudian tercermin dalam asas atau dasar partai yang lebih memilih Pancasila sebagai fondasinya.

Penulis melihat, jalan ini menjadi solusi dan tidak akan mengganggu fungsi PKB sebagai partai politik. Nilai-nilai Islam yang terbuka, toleran dan damai dapat difungsikan sebagai sebetuk “agama sipil” oleh PKB, sehingga dapat menjadi etika publik dalam menjalankan peranannya.

Selaras dengan itu, dalam konteks lembaga, pesantren tentu saja institusi yang tidak bisa dipisahkan dari PKB. Pesantren menjadi agen sosialisasi politik bagi PKB, sekaligus lumbung suara yang sangat penting. Mengingat sebagian

besar warga NU ada di lokus ini, maka melibatkan pesantren dalam aktivitas politik menjadi sebuah keniscayaan.

Di sini mungkin bisa saja muncul masalah karena sejatinya pesantren adalah institusi pendidikan keagamaan tradisional. Saat melaksanakan fungsi rekrutmen misalnya. PKB akan melakukan rekrutmen dengan menyeleksi dan melatih mereka yang berasal dari pesantren (baca: kiai dan keluarganya) --- problemnya tentu berkaitan dengan kualitas. Apakah kalangan pesantren mampu mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi, padahal harus diakui, kalangan pesantren terlibat dalam pergumulan politik praktis, baru pada pasca reformasi.

Kepustakaan

- Almond, Gabriel dan Powell Jr. 1978. *Comparative Politics: System, Process and Policy*. London: Little, Brown and Company.
- Barton, Greg. 2010. *Biografi Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Benda, Harry J. 1958. *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Boland, B. J. 1971. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Burhanuddin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Choirie, Effendy. 2008. *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB: Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Grafika Indah.
- Chusunia. 2011. “Konflik Gus Dur-Muhaimin Iskandar Dalam Tubuh Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2008,” dalam *Tesis di*

- Program Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta Program Magister Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Dhakiri, Muhammad Hanif dan kawan-kawan. 2006. *PKB Masa Depan*. Jakarta: DPP Partai Kebangkitan Bangsa.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Dick-Read, Robert. 2008. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*. Bandung: Mizan.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. 2013. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Duverger, Maurice. 1993. *Sosiologi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik NU: Sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: LKiS.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Haidar, Ali. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2014. *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeneutika Gadamer*. Jakarta: LP3ES.
- Horikoshi, Hiroko *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Kartaprawira, Rusadi. 2007. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kartodirdjo, Sartono. 1972. *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad-19 dan Abad-20*. Yogyakarta: Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Minan, Ahsanul dan kawan-kawan. 2007. *Khidmat Kami Bagimu Negeri; Laporan Kinerja Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRRI 2005-2006*. Jakarta: FKB DPR RI.
- Nahrowi, Imam. 2006. *Moralitas Politik PKB*. Malang: Averroes.
- Porter, Donald J. 2002. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London and New York: Routledge Curzon.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Tim Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. 2003. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Ditjen Kelambagaam Agama Islam dan Pondok Pesantren, 2003.
- Wahid, Wahid et.al (eds.). 1999. *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Winarno, Budi. 2007. *Politik Indonesia di Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Vlekke, Bernard H.M. 2008. *Nusantara: A History of Indonesia*. Jakarta: KPG.